

Untung Rugi Pelarangan Ekspor Minyak Sawit

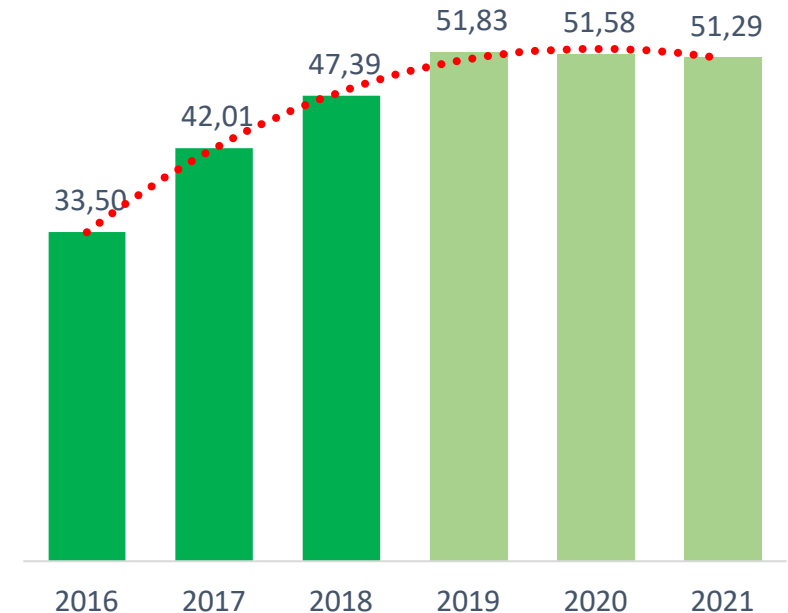
Alamsyah Saragih

Neraca Minyak Sawit Indonesia 2018-2021

Sinyal krisis stok mulai terlihat paska tahun 2019, produksi stagnan, ekspor meningkat tipis sementara konsumsi domestik meningkat secara berarti.

Tabel-1
Neraca Minyak Sawit (juta ton)

Komponen	2018	2019 ¹	2020 ²	2021	2022 ³
1. Stok Awal & Impor	4,02	3,62	2,64	2,87	1,54
2. Produksi CPO dan CPKO	47,44	51,83	51,58	51,29	52,68
3. Konsumsi Domestik	13,49	16,67	17,35	18,42	20,59
Pangan dan Oleokimia	9,69	10,92	10,12	10,12	11,08
Biodiesel	3,80	5,83	7,23	7,23	7,34
4. Ekspor	34,71	36,18	34,01	34,20	34,44
5. Surplus produksi (2-3-4)	(0,76)	(1,02)	0,23	(1,33)	(2,35)
6. Stok Akhir (1+5)	3,26	2,60	2,87	1,54	(0,81)
7. % thd total produksi	6,9%	5,0%	5,6%	3,0%	-1,5%



Keterangan:

1. Perhitungan menggunakan basis data 2018 GAPKI. Selanjutnya perhitungan stok akhir merupakan stok awal (stok tahun sebelumnya) ditambahkan surplus/defisit yang merupakan selisih produksi dikurangi konsumsi domestik dan ekspor tahun berjalan. Ditemukan peningkatan stok awal di tahun 2019 yakni 4,6 juta ton tanpa jelas asalnya, maka yang digunakan adalah stok akhir 2018 sebagai stok awal 2019, dan begitu seterusnya.
2. Kebijakan B30 diterapkan.
3. Prediksi GAPKI, pada tahun 2022; Mulai dilakukan uji coba kebijakan B40.

Harga CPO pernah mengalami kenaikan tinggi, tapi 2 tahun terakhir paling ekstrim



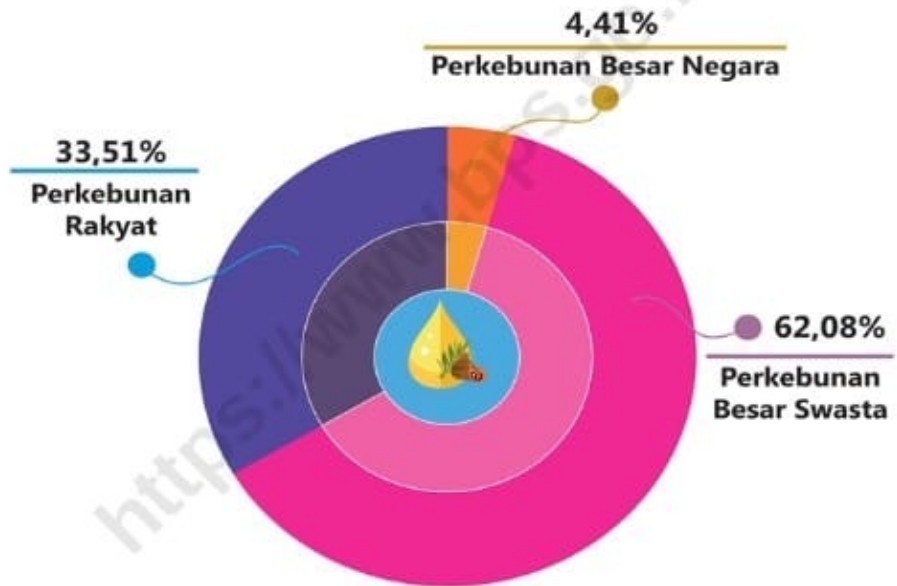
- Indonesia produsen CPO terbesar
- Peningkatan konsumsi domestik sejak diterapkan program biodiesel (B30) menyebabkan neraca sawit semakin menipis.
- Pandemi, situasi iklim global dan perang Ukraina vs Rusia menyebabkan pasokan komoditi substitusi menurun, harga meningkat drastis.
- Pengurangan ekspor Indonesia akan meningkatkan eskalasi harga CPO maupun minyak nabati lainnya.
- Korelasi harga CPO terhadap minyak nabati lainnya relatif tinggi.

Untung Rugi Pelarangan Ekspor

- Dalam kelangkaan masif dan peningkatan harga yang drastis lazim dilakukan, namun sangat bersifat temporer dan berada di bawah rezim *trade war*, bukan rezim proteksi.
- Tanpa kontraksi drastis di sisi supply paling cepat untuk menurunkan harga, namun akan sangat berdampak kepada harga pasokan di hulu (sawit petani).
- BPDP-KS akan kehilangan sumber penerimaan, dan Pemerintah akan kehilangan sumber devisa. Pembiayaan insentif biodiesel akan tertekan.
- Perlu eskalasi serapan domestik yang cepat. Jika melimpahnya pasokan tak seimbang dengan serapan lain (a.l: biodiesel), maka akan ada risiko: pengurangan jumlah produksi massal; penurunan harga domestik; dan ekspor ilegal.

Kondisi di Lini Hulu

Perbandingan Produksi Minyak Sawit Indonesia Menurut Status Pengusahaan, 2019

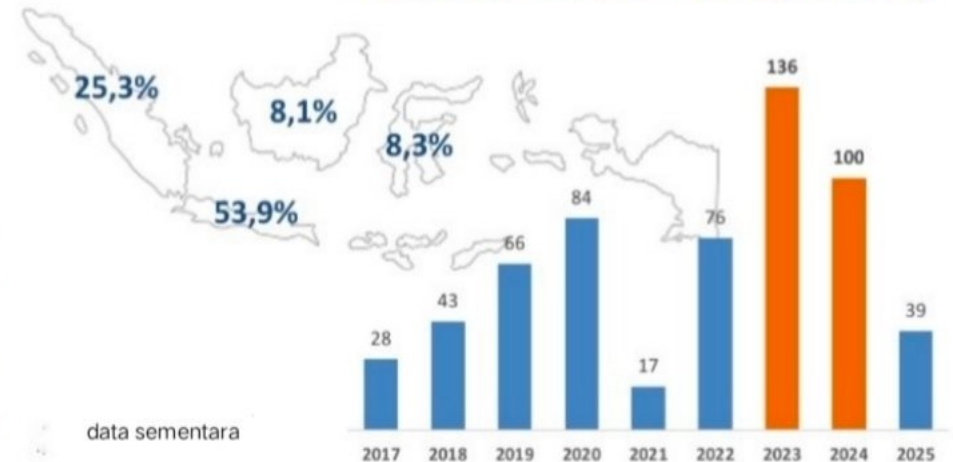


Sumber: BPS, 2020

Diperlukan transformasi hak kelola ?

Selama 2017-2025 akan ada 590 HGU Jatuh Tempo. Tanpa transformasi hak kelola kepada rakyat diperkirakan kenaikan harga komoditi seperti sawit hanya akan menguntungkan perusahaan besar dan menekan konsumen.

HAK GUNA USAHA JATUH TEMPO (2017-2025)



Puncak HGU Jatuh Tempo akan terjadi pada tahun 2023-2024 (masa kampanye dan pemilihan umum)

... diperlukan adalah perubahan fundamental untuk menyangga kebijakan pelarangan ekspor

1. Relaksasi ekspor dan meningkatkan secara signifikan serapan program biodiesel ke tingkat paling optimal untuk keseimbangan 3 variabel penting: harga sawit petani, devisa dan harga produk hilir.
2. Mengubah sistem pungutan dan insentif biodiesel yang berbasis harga internasional ke harga domestik sesuai perkembangan.
3. Menerapkan sistem cadangan CPO nasional yang dikelola oleh BUMN untuk memastikan kecukupan CPO dalam rangka ketahanan pangan.
4. Menerapkan sistem perpanjangan HGU regresif untuk mengatasi konsentrasi aset dalam industri, mempercepat investasi di lini hilir dan mentransformasi peran BPDP-KS: fokus pada peremajaan sawit, riset, hilirisasi.